

## KEWARGANEGARAAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI, PILAR KESEJAHTERAAN BANGSA

Fifi Lailatun Nikma<sup>1</sup>, Hilmiyatusoliha<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>123187203020, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi & Psikologi,  
 Universitas PGRI Wiranegara,

<sup>2</sup>223187203024, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi & Psikologi,  
 Universitas PGRI Wiranegara,

<sup>3</sup>323187203025, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi & Psikologi,  
 Universitas PGRI Wiranegara

[1fifilailatunnikma@gmail.com](mailto:fifilailatunnikma@gmail.com), [2hilmimia91@gmail.com](mailto:hilmimia91@gmail.com), [3dhiayee0@gmail.com](mailto:dhiayee0@gmail.com)

### Abstract

*Citizenship and economic empowerment are the two main pillars that play a role in creating the welfare of the nation. Citizenship not only encompasses the rights and obligations of individuals in participating in the life of the country, but also involves active contributions to social, economic, and political development. A high sense of social responsibility and an understanding of basic rights as citizens are important foundations for creating an inclusive and empowered society. On the other hand, economic empowerment focuses on strengthening the economic capacity of individuals and communities to create economic independence and equitable distribution of welfare. This empowerment can be realized through increasing access to education, skills training, financing, and technological innovations that can open up business opportunities and improve the quality of life. In the Indonesian context, effective economic empowerment must also include equitable development between regions, considering disparities economy that still occurs between urban and rural areas. This study aims to examine the relationship between citizenship and economic empowerment in improving the welfare of the nation. Through a holistic approach that integrates these two aspects, it is hoped that a system will be created that supports inclusive economic growth, reduces social inequality, and creates more equitable opportunities for all Indonesian people. Active citizenship and sustainable economic empowerment are critical foundations in achieving the goals of a just and prosperous nation's welfare.*

**Keywords:** *Citizenship, Economic Empowerment, Nation Welfare*

### Abstrak

Kewarganegaraan dan pemberdayaan ekonomi adalah dua pilar utama yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan bangsa. Kewarganegaraan tidak hanya mencakup hak dan kewajiban individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan negara, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dalam pembangunan

### Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

sosial, ekonomi, dan politik. Rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dan pemahaman akan hak-hak dasar sebagai warga negara menjadi landasan penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berdaya. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi individu dan komunitas untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pemberdayaan ini dapat diwujudkan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pembiayaan, dan inovasi teknologi yang dapat membuka peluang usaha serta memperbaiki kualitas hidup. Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan ekonomi yang efektif juga harus mencakup pemerataan pembangunan antar wilayah, mengingat disparitas ekonomi yang masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kewarganegaraan dan pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut, diharapkan tercipta sebuah sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewarganegaraan yang aktif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan merupakan fondasi yang sangat penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan bangsa yang adil dan makmur.

**Kata kunci:** Kewarganegaraan, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Bangsa

## PENDAHULUAN

### Latar belakang

Kewarganegaraan dan pemberdayaan ekonomi merupakan dua aspek fundamental yang saling melengkapi dalam upaya mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Kewarganegaraan bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga mencakup peran aktif setiap individu dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, baik secara langsung melalui partisipasi politik maupun tidak langsung melalui kontribusi sosial dan ekonomi. Kontribusi ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, memiliki kesadaran tinggi akan hak-hak dasar, serta memahami peranannya dalam kemajuan bersama. Kewarganegaraan yang aktif ini akan mengarah pada terwujudnya masyarakat yang inklusif, adil, dan demokratis. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi individu dan komunitas dalam menciptakan kemandirian dan pemerataan kesejahteraan. Pemberdayaan ekonomi yang efektif dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar individu maupun antar daerah. Di Indonesia, pemberdayaan ekonomi menjadi semakin relevan mengingat masih adanya disparitas ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan sumber daya. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi juga harus dilihat dalam

konteks pembangunan yang berkelanjutan, yang mempertahankan peningkatan ekonomi jangka pendek serta pemanfaatan sumber daya yang adil.

Pentingnya pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan kewarganegaraan yang aktif menjadi sangat jelas, karena keduanya berfungsi saling menguatkan dalam membangun fondasi sosial-ekonomi yang kuat. Pemberdayaan ekonomi yang mendalam dapat mendorong partisipasi sosial yang lebih besar, sementara kewarganegaraan yang aktif dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Dalam konteks Indonesia, dengan populasi yang sangat besar dan keragaman sosial serta ekonomi yang tinggi, pendekatan yang holistik dan berbasis pada kedua pilar ini sangat diperlukan untuk menciptakan kemajuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kewarganegaraan dan pemberdayaan ekonomi serta bagaimana keduanya saling mendukung dalam menciptakan kesejahteraan bangsa. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai keduanya, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, kewarganegaraan yang aktif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan akan menjadi pilar yang kokoh dalam mencapai tujuan utama negara, yakni kesejahteraan rakyat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

Kewarganegaraan adalah status hukum seseorang yang menunjukkan keanggotaannya dalam suatu negara, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Sebagai warga negara, individu tidak hanya memiliki hak, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat, tetapi juga memikul kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan berkontribusi dalam menjaga ketertiban umum. Pendidikan kewarganegaraan menjadi aspek penting dalam membangun kesadaran individu terhadap hak dan kewajiban tersebut. Pendidikan ini bermaksud untuk mencetak warga negara yang berkewajiban, kritis, dan terlibat secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi warga negara merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan politik, seperti melalui pemilu dan forum musyawarah. Namun, pelaksanaan kewarganegaraan tidak terlepas dari tantangan, seperti kurangnya kesadaran hukum, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan pengaruh globalisasi, seperti kasus kewarganegaraan ganda atau *statelessness*. Selain itu, kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan nasionalisme, yaitu semangat cinta tanah air yang mendorong warga negara untuk menjaga persatuan, keadilan, dan keberlanjutan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran strategis dalam memperkuat nasionalisme dan membangun kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta keberagaman bangsa Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan mengenai Kewarganegaraan, Pemberdayaan Ekonomi, dan Kesejahteraan Bangsa ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menghubungkan teori dan praktik dalam konteks Indonesia, serta untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya kolaborasi antara kewarganegaraan yang aktif, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi. Dengan demikian, metode deskriptif analitis memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### 1. Kewarganegaraan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi

Pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah proses pertumbuhan yang komprehensif. Pertumbuhan ini mencakup kemampuan suatu negara untuk terus berkembang secara kuantitatif dan kualitatif, yang memasukkan berbagai aspek kehidupan. Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sesuai dengan harapan masyarakat. Proses ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan ataupun tanpa usaha; sebaliknya, diperlukan perencanaan yang matang dan sistematis agar pertumbuhan tersebut dapat berlanjut dengan baik. Dengan demikian, pembangunan adalah sebuah rencana yang tersusun dengan rapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kewarganegaraan bukan hanya status hukum yang menentukan hubungan seseorang dengan negara mereka, tetapi juga peran yang dimainkan setiap warga negara dalam kehidupan nasional dan global. Sebenarnya, pembangunan sosial adalah tanggapan terhadap dominasi pembangunan ekonomi yang telah lama mengedepani berbagai model pembangunan. Dengan kemajuan baru-baru ini, menjadi lebih jelas bahwa, sebagai saling melengkapi, paradigma pembangunan ekonomi dan paradigma pembangunan sosial harus diimbangi. Todaro (1994) menyatakan bahwa sistem ekonomi perlu dianalisis dan ditempatkan dalam konteks sistem sosial secara menyeluruh di suatu negara, serta tentunya dalam konteks global internasional.

Faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi saling berhubungan dalam sistem sosial yang dimaksud. Para ahli ekonomi sekarang menyadari bahwa pertumbuhan pendapatan atau pendapatan per kapita bukan satu-satunya cara untuk mengukur pembangunan ekonomi. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan secara merata di antara orang-orang. Ini menentukan siapa yang mendapatkan manfaat maksimal dari hasil pembangunan. Analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran pembangunan konvensional telah ditinggalkan. Menjadi warga negara yang baik berarti memahami hak dan kewajiban Anda serta berpartisipasi dalam proses sosial, ekonomi, dan politik yang dilakukan untuk memajukan negara. Ini ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan kepada semua orang karena warga negara yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya lebih cenderung terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi, seperti gotong royong, partisipasi politik, dan kontribusi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kewarganegaraan yang baik dan aktif akan mendorong warga negara untuk lebih banyak berpartisipasi dalam ekonomi berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ia berkontribusi pada inovasi, persaingan, dan dinamika ekonomi, yang semuanya merupakan faktor krusial bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa hubungan antara kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat positif dan dapat menunjukkan variasi dalam konteks geografis. Sebagai contoh, kewirausahaan terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang sudah maju, sementara di kawasan yang kurang berkembang, dampaknya mungkin berbeda. Pemerintah, dalam hal ini, perlu memberikan fasilitas dan program yang dapat mengedukasi masyarakat agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja dan bisnis. Program-program yang berbasis pada kewarganegaraan seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan ekonomi, dan penguatan lembaga-lembaga masyarakat, akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Kesimpulannya, kewirausahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inovasi, kualitas tata kelola pemerintahan, kebebasan ekonomi, serta perbedaan regional. Untuk memaksimalkan efek positif kewirausahaan tersebut, para pembuat kebijakan perlu berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung para wirausahawan dan mendorong inovasi.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi sebagai Pilar Kesejahteraan Bangsa**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nasional, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan komponen penting. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat secara partisipatif yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya dan menciptakan peluang usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya sosial-budaya dan alam masyarakat memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk memahami masalah dan kebutuhan mereka karena masyarakat memiliki "kekuatan" yang dapat digali dan digunakan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Mereka juga dididik untuk membuat rencana pembangunan dan berkembang secara mandiri dan swadaya. Oleh karena itu, gerakan pemberdayaan membantu pembangunan masyarakat "dari, oleh, dan untuk" (Harry Hikmat, 2010:217-218).

Di Indonesia, pemberdayaan ekonomi sering kali difokuskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pilar perekonomian negara. Dengan pemberdayaan yang tepat, UMKM memiliki kemampuan untuk berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pembagian kekayaan di seluruh masyarakat. Pendekatan 5P dapat digunakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah Pemungkinan, yang berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Dalam hal ini, pemberdayaan harus mampu mengatasi hambatan kultural dan struktural yang menghalangi kemajuan. Kedua, penguatan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menangani berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Pemberdayaan harus mendorong pengembangan kemampuan dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk mendukung kemandirian mereka sendiri. Ketiga, perlindungan, di mana masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan, dilindungi dari serangan oleh kelompok yang lebih

kuat. Hal ini sangat penting untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan bahkan tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah. Ini juga penting untuk mencegah kelompok kuat mengeksploitasi kelompok lemah. Untuk menghilangkan diskriminasi dan kekuasaan yang merugikan masyarakat kecil, pemberdayaan harus diarahkan. Keempat, dukungan membantu orang melakukan tugas dan peran sehari-hari. Pemberdayaan harus membantu masyarakat menghindari menjadi lemah dan terpinggirkan. Kelima, Pemeliharaan: Memastikan bahwa lingkungan tetap kondusif untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan 5P ini.

Namun, pemberdayaan ekonomi tidak hanya tentang peningkatan pendapatan atau usaha, tetapi juga tentang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung sektor ekonomi rakyat, seperti penyediaan modal usaha, akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta peningkatan akses pasar dan jaringan distribusi untuk produk-produk lokal. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga mencakup pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam membuka peluang usaha baru, serta menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah, baik antara kota dan desa maupun antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda.

### **3. Hubungan Antara Kewarganegaraan dan Pemberdayaan Ekonomi**

Proses pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada warga negara yang aktif. Ketika mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan nasional dan internasional, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dapat memperbaiki kondisi mereka sendiri dan masyarakat sekitar mereka. Pemberdayaan ekonomi yang sukses membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan kewarganegaraan yang baik memberikan dasar yang kuat untuk terjadinya partisipasi tersebut. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat kualitas kewarganegaraan.

Melalui pemberdayaan ekonomi, masyarakat dapat lebih mandiri secara finansial, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Hal ini juga akan menciptakan rasa tanggung jawab sosial yang lebih besar, yang mendorong masyarakat untuk turut serta dalam memperbaiki sistem dan struktur sosial-ekonomi negara. Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi berperan dalam memperkuat aspek kewarganegaraan, karena warga negara yang makmur cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

### **4. Kesejahteraan Bangsa sebagai Tujuan Akhir**

Tujuan akhir dari pemberdayaan ekonomi dan kewarganegaraan yang baik adalah tercapainya kesejahteraan bangsa yang merata dan berkelanjutan. Indikator ekonomi bukan satu-satunya cara untuk mengukur kesejahteraan sebuah negara; kualitas kehidupan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan juga merupakan indikator lainnya. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial akan menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya menguntungkan sekelompok orang, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia adalah sebuah proyek bersama yang menuntut komitmen dan kerja keras dari semua elemen masyarakat. Dengan memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi ketimpangan sosial, menjaga

kelestarian lingkungan, serta mendorong inovasi, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih adil bagi seluruh warganya. Semoga semua upaya ini dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang makmur, berkelanjutan, dan sejahtera untuk semua.

Di Indonesia, kesejahteraan bangsa harus melibatkan pemerataan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ini menjadi tantangan besar mengingat adanya ketimpangan yang masih terjadi antara wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, seperti pengembangan infrastruktur di daerah terpencil dan penguatan sektor-sektor ekonomi lokal, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Selain itu, penerapan sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial harus dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan ekonomi bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia dapat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan antar kelompok sosial. Dengan demikian, kewarganegaraan yang aktif, pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial yang kuat, serta pemerataan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembelajaran Kewarganegaraan dan Pemberdayaan Ekonomi, Pilar Kesejahteraan Bangsa adalah untuk membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan individu dapat mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menghasilkan warga negara yang cerdas, berkarakter dan terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya fokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks pemberdayaan ekonomi, guna mewujudkan kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.

## KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu yang memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Melalui pendidikan ini, generasi muda diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan juga menanamkan kesadaran akan keberagaman budaya, toleransi, dan pentingnya menjaga solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan penguatan pemahaman ini, individu tidak hanya menjadi pribadi yang berintegritas tetapi juga mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik.

Namun, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan menghadapi tantangan signifikan, seperti pengaruh globalisasi yang mengikis nilai-nilai lokal serta rendahnya perhatian terhadap pendidikan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan sinergi ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi alat yang

efektif untuk membangun generasi muda yang tangguh, kritis, dan berdaya saing, tetapi tetap menjunjung tinggi identitas dan kearifan lokal Indonesia di tengah arus globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Arfianto & Balahmar, 2014) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa.
- (Asyafiq, 2019) Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan.
- (Nada & Kartika Sari, 2021) Strategi Kepala Desa Karangagung Dalam Melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Alun-Alun.
- (Hasanah & Medan, 2024) Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan
- (Fauzan, 2018) Alternatif Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together sebagai Upaya Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi dalam Pembelajaran PKn.
- (Agustana, 2020) Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial.
- (Supeni et al., 2022) Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat di Era Pandemi Covid 2019.
- (Hariyanto, 2021) Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.
- (Rijal et al., 2023) Eksplorasi Hubungan antara Kewirausahaan dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Perbandingan tentang Negara Maju dan Negara Berkembang.